



# Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024



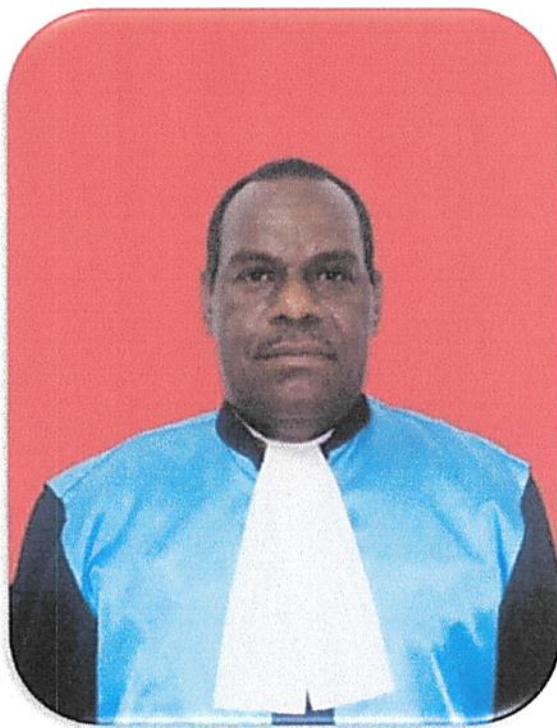
## Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Jln. Raya Sentani – Waena – Jayapura  
99358 Telepon / Faksimili (0967) 571639  
(K), 571216 (P) E-mail  
[ptun.jayapura@gmail.com](mailto:ptun.jayapura@gmail.com) SITUS  
[www.ptun-jayapura.go.id](http://www.ptun-jayapura.go.id)

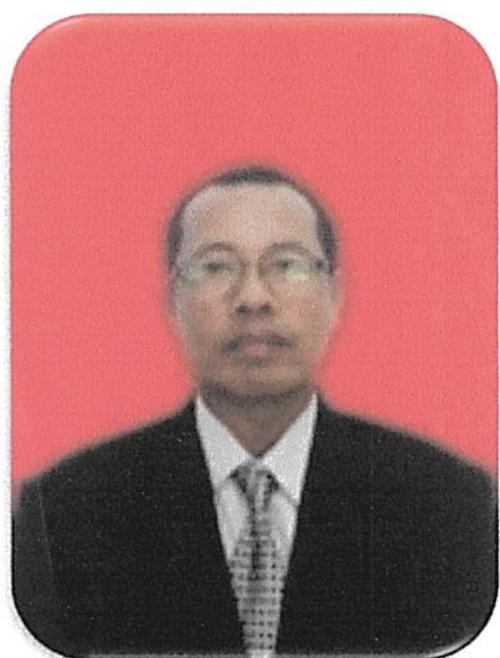
**PIMPINAN**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**



**MERNA CINTHIA. S.H.,M.H**  
**KETUA**



**YUSUF KLEMEN, S.H**  
**WAKIL KETUA**



**SUYADI, S.H**  
**PANITERA**



**FEFI YANTI THOMAS, S.E**  
**SEKRETARIS**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin dalam menjalankan tugas selaku abdi Negara dan abdi masyarakat semoga mendapat perlindungan dan bimbingan dari Tuhan Yang Maha Esa dalam mengemban amanah tersebut.

Laporan ini menguraikan secara deskriptif mengenai pelaksanaan tugas Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura di Tahun 2024, yang meliputi tugas pokok dan tugas penunjang. Tugas tersebut meliputi tugas Bidang Teknis Yudisial, Administrasi Kepaniteraan, Administrasi Kesekretariatan, Bidang Pengawasan serta Bidang Pengadaan Sarana dan Prasarana Fisik. Kami menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok dan fungsi yang telah kami laksanakan masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan, baik di bidang Administrasi Teknis Yudisial maupun Administrasi Non Teknis Yudisial, oleh karena itu pengawasan, evaluasi serta pembinaan dalam pelaksanaan tugas sangat kami harapkan agar kami dapat melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2024 ini kami sajikan, dengan harapan dapat memberikan manfaat dan informasi berguna bagi kita semua dalam rangka mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sebagai lembaga peradilan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta dapat dijadikan sebagai acuan untuk peningkatan kinerja pada pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi pada tahun-tahun berikutnya

Demikianlah kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Jayapura, 24 Januari 2025



## DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Bab I. PENDAHULUAN	1
Bab II. PERKARA	5
A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA	5
- Keadaan Perkara Tingkat Pertama	5
- Keadaan Perkara Tingkat Banding	6
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	7
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	7
B. PENYELESAIAN PERKARA	7
- Jumlah Sisa Perkara yang Diputus	7
- Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu	9
- Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK	10
C. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL	12
- Posbakum	12
- Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu	12
- Perkara Prodeo (Pembebasan Baiaya Perkara)	12
BAB III. SUMBER DAYA MANUSIA	13
- Mutasi	15
- Promosi	16
- Pensiun	16
- Diklat (SDM Teknis/Non Teknis)	16
BAB IV. PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, TEKNOLOGI INFORMASI	19
A. Pengelolaan Keuangan	19

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	23
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	33
<b>BAB V. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>34</b>
- Akreditasi Penjaminan Mutu	34
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	34
- Inovasi Pelayanan Publik	35
<b>BAB VI. PENGAWASAN</b>	<b>36</b>
A. Internal	36
B. Evaluasi	37
<b>BAB VII. PENUTUP</b>	<b>41</b>
A. Kesimpulan	41
B. Rekomendasi	42

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua	1
Tabel 2.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat	1
Tabel 3.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Selatan	2
Tabel 4.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Tengah	2
Tabel 5.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Pegunungan	2
Tabel 6.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat Daya	3
Tabel 7.	Keadaan Perkara Tahun 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	5
Tabel 8.	Keadaan Perkara Tingkat Banding di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	6
Tabel 9.	Keadaan Perkara Tingkat Kasasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	7
Tabel 10.	Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	7
Tabel 11.	Jumlah Perkara Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	8
Tabel 12.	Status Perkara Gugatan per 31 Desember 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	8
Tabel 13.	Ketepatan Waktu Putusan Perkara yang Diproses pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	9
Tabel 14.	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	10
Tabel 15.	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	11
Tabel 16.	Jumlah Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	11
Tabel 17.	Susunan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	14
Tabel 18.	Mutasi Pegawai pada Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	15
Tabel 19.	Promosi Pegawai pada Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	16

Tabel 20.	Diklat SDM Teknis dan Non Teknis Hakim dan Pegawai pada Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	16
Tabel 21.	Rincian Anggaran Belanja Pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	19
Tabel 22.	Rincian Belanja Barang dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	20
Tabel 23.	Rincian Belanja Barang dalam DIPA Ditjenbadilmiltun Tahun Anggaran 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	21
Tabel 24.	Laporan Biaya/Panjar Biaya Perkara Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	21
Tabel 25.	Laporan Biaya Proses/ATK/Pemberkasan Perkara Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	22
Tabel 26.	Laporan Biaya Eksekusi Perkara Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	22
Tabel 27.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DIPA BUA dan DIPA DITJENBADILMILTUN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	23
Tabel 28.	Laporan Kendaraan Dinas Per 31 Desember 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	24
Tabel 29.	Daftar Sarana dan Prasarana Barang Milik Negara Per 31 Desember 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	29
Tabel 30.	Daftar Nama Hakim Pengawas Bidang Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	37

## BAB I

### PENDAHULUAN

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura dibentuk berdasarkan Kepres No. 16 Tahun 1993. Kantor PTUN Jayapura diresmikan pada 23 April 1993 oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Bapak Oetoyo Oesman, SH. PTUN Jayapura mulai beroperasi pada awal tahun 1994, berkedudukan di Jln. Raya Sentani – Waena Jayapura.

Adapun yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura meliputi seluruh wilayah Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Barat Daya, yakni:

#### I. Provinsi Papua

**Tabel 1. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua**

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kota Jayapura	Jayapura
2.	Kabupaten Jayapura	Sentani
3.	Kabupaten Keerom	Waris
4.	Kabupaten Sarmi	Sarmi
5.	Kabupaten Waropen	Botawa
6.	Kabupaten Supiori	Sorendiweri
7.	Kabupaten Mamberamo jaya	Burmeso
8.	Kabupaten Kepulauan Yapen	Serui

#### II. Provinsi Papua barat

**Tabel 2. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat**

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Fak-fak	Fak-fak
2.	Kabupaten Kaimana	Kaimana
3.	Kabupaten Manokwari	Manokwari
4.	Kabupaten Manokwari Selatan	Ransiki
5.	Kabupaten pegunungan Arfak	Anggi
6.	Kabupaten Teluk Bintuni	Bintuni
7.	Kabupaten Teluk Wondama	Rasiei

#### III. Provinsi Papua Selatan

**Tabel 3. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Selatan**

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Merauke	Merauke
2.	Kabupaten Boven Digoel	Tanah Merah
3.	Kabupaten Mappi	Kepi
4.	Kabupaten Asmat	Agats

#### IV. Provinsi Papua Tengah

**Tabel 4. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Tengah**

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Nabire	Nabire
2.	Kabupaten Paniai	Enarotali
3.	Kabupaten Mimika	Timika
4.	Kabupaten Dogiyai	Kigamani
5.	Kabupaten Intan Jaya	Sugapa
6.	Kabupaten Deiyai	Tigi
7.	Kabupaten Puncak	Ilaga
8.	Kabupaten Puncak Jaya	Mulia

#### V. Provinsi Papua Pegunungan

**Tabel 5. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Pegunungan**

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Jayawijaya	Wamena
2.	Kabupaten Pegunungan Bintang	Oksibil
3.	Kabupaten Yahukimo	Sumohai
4.	Kabupaten Tolikara	Karubaga
5.	Kabupaten Mamberamo Tengah	Kobakma
6.	Kabupaten Yalimo	Elekmi
7.	Kabupaten Lanny Jaya	Tiom
8.	Kabupaten Nduga	Kenyam

## VI. Provinsi Papua Barat Daya

**Tabel 6. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat Daya**

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kota Sorong	Sorong
2.	Kabupaten Sorong	Aimas
3.	Kabupaten Sorong Selatan	Teminabuan
4.	Kabupaten Maybrat	Kamurkek
5.	Kabupaten Tambrauw	Fef
6.	Kabupaten Raja Ampat	Waisai

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan suatu tonggak yang menjadi tumpuan harapan masyarakat atau warga Negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh perbuatan pejabat administrasi karena keputusan yang dikeluarkannya.

Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat terhadap perbuatan pejabat administrasi yang melanggar hak asasi dalam lapangan hukum administrasi Negara. Kecuali itu, kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara akan memberikan perlindungan hukum yang sama kepada pejabat administrasi yang bertindak benar dan sesuai dengan hukum. Jadi fungsi dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah; *Pertama*, sebagai lembaga kontrol (pengawas) terhadap tindakan pejabat administrasi supaya tetap berada dalam rel hukum. *Kedua*, adalah sebagai wadah melindungi hak individu dan warga masyarakat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat administrasi.

Sebagai lembaga pengawas (*judicial control*), ciri-ciri yang melekat pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah :

1. Pengawasan yang dilakukan bersifat “*external control*”, karena merupakan lembaga yang berada di luar kekuasaan pemerintahan.
2. Pengawasan yang dilakukan lebih menekankan pada tindakan represif atau lazim disebut “*control a posteriori*”, karena selalu dilakukan sesudah terjadinya perbuatan yang dikontrol.
3. Pengawasan itu bertitik tolak pada segi “*legalitas*”, karena hanya menilai dari segi hukum (*rechmatigheid*) - nya saja.

Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung dimulai sejak Tahun 2007 yang ditandai dengan pemberian Tunjangan Khusus Kinerja. Mahkamah Agung dijadikan pilot project dalam rangka Reformasi Birokrasi yang dikaitkan dengan Tunjangan Khusus Kinerja yang dibayarkan mulai bulan September 2007. Restrukturisasi Organisasi yang dimulai sejak tahun 2004 dengan menggunakan metode one road system telah berjalan sesuai yang diharapkan. Namun

demikian masih banyak hal-hal yang perlu terus menerus diadakan perbaikan. Mahkamah agung menerapkan 8 jalur perubahan. Adapun 8 ( delapan ) Area Perubahan tersebut adalah :

- Pola Pikir dan Budaya Kerja,
- Penataan Peraturan Perundang-undangan,
- Penataan dan Penguatan Organisasi,
- Penataan Tata laksana,
- Penataan SDM Aparatur,
- Penguatan Pengawasan,
- Penguatan Akuntabilitas Kinerja,
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Dengan adanya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tanggal 30 Agustus 2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Pengadilan, dimana point terpenting dari adanya SK KMA tersebut adalah kewajiban tiap Pengadilan untuk memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Untuk itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berkomitmen untuk dapat memberikan keterbukaan informasi sebagai upaya transparansi lembaga serta dalam upaya peningkatan kinerja lembaga. Akses masyarakat terhadap informasi pengadilan melalui situs resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yaitu [www.ptun-jayapura.go.id](http://www.ptun-jayapura.go.id), dimana informasi-informasi yang disajikan telah disesuaikan dengan jenis informasi yang harus diumumkan.

## BAB II

### A. Keadaan Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

#### - Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Keadaan Perkara per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 42 perkara, terdiri dari 9 perkara sisa tahun 2023 dan 33 perkara terdaftar tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7. Keadaan Perkara Tahun 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	NOMOR PERKARA	TANGGAL PENERIMA AN	DISMISSAL		TANGGAL PENETAP AN	TANGGAL PENETAPAN MH/HT&PP	SUSUNAN MAJELIS HAKIM & PP	ACARA BIASA/ACARA CEPAT			KETERANGAN
			PANGGIL AN	PENETAP AN				PEMRIKSAN PERSIAPAN	DIMULAI SIDANG	PUTUSAN	
1	2	3	4	5	6	12	13	14	15	16	20
1	23/G/2023/PTUN.JPR	20-07-2023	-	-	-	20-07-2023	B, C2, C3/D1	31-07-2023	23-08-2023	18-01-2024	KETUA : MERNA CINTHIA, S.H., M.H WAKIL : YUSUF KLEMEN, S.H HAKIM-HAKIM: 1. DONNY POJA, S.H 2. RATNA JAYA, S.H
2	24/G/2023/PTUN.JPR	01-08-2023	-	-	-	01-08-2023	B, C1, C2/D8	09-08-2023	23-08-2023	24-01-2024	A B C C1 C2
3	25/G/2023/PTUN.JPR	25-08-2023	-	-	-	11-09-2023	C1, C2, C3/D7	20-09-2023	18-10-2023	31-01-2024	
4	26/G/2023/PTUN.JPR	11-09-2023	-	-	-	12-09-2023	C1, C2, C3/D3	20-09-2023	11-10-2023	12-02-2024	
5	27/G/2023/PTUN.JPR	19-09-2023	-	-	-	20-09-2023	A, C1, C2/D6	02-10-2023	19-10-2023	28-03-2024	
6	29/G/2023/PTUN.JPR	24-10-2023	-	-	-	01-11-2023	C2, C1, C3/D5	07-11-2023	30-11-2023	27-03-2024	PANITERA / P. PENGGANTI: 1. S U Y A D I, S.H. D 2. ADE RUDIANTO D1 3. JERIKA W. RISAKOTTA, S.H., M.H D2 4. PETRUS MITTING, S.H. D3 5. DAVID ALIK MITTING, S.H. D4 6. ELIZABETH KAIKATUY, S.H. D5 7. KOMARUDIN, S.H. D6 8. EFRAIM YOSEPH PATTY, S.H. D7
7	30/G/2023/PTUN.JPR	31-10-2023	-	-	-	31-10-2023	A, C1, C2/D7	06-11-2023	24-11-2023	28-03-2024	
8	31/G/2023/PTUN.JPR	16-11-2023	-	-	-	17-11-2023	A, C1, C2/D1	24-11-2023	11-12-2023	02-04-2024	
9	33/G/2023/PTUN.JPR	30-11-2023	-	-	-	30-11-2023	A, C2, C3/D	4-12-2023	29-01-2024	21-05-2024	
10	1/G/2024/PTUN.JPR	16-01-2024	-	-	-	16-01-2024	C2,C1,C3/D2	30-01-2024	14-03-2024	05-09-2024	
11	2/G/2024/PTUN.JPR	26-01-2024	-	-	-	26-01-2024	B,C1,C3/D6	06-02-2024	05-03-2024	04-06-2024	REKAPITULASI
12	3/G/2024/PTUN.JPR	31-01-2024	A/D	13-02-2024	26-02-2024	-	-	-	-	-	1. Sisa Tahun Lalu : 9 2. Masuk Tahun ini : 33 3. - Putus : 21 - Cabut : 5 - Dismissal : 3
13	4/G/2024/PTUN.JPR	07-02-2024	-	-	-	07-02-2024	B,C1,C3/D1	21-02-2024	28-03-2024	29-08-2024	4. Sisa Tahun Ini : 13 5. Belum di bagi : - 6. Belum di Putus : 13 7. Dalam Minutasi : -
14	5/G/2024/PTUN.JPR	26-02-2024	-	-	-	26-02-2024	C3,C1,C2/D3	06-03-2024	02-04-2024	17-04-2024	
15	6/G/2024/PTUN.JPR	13-03-2024	-	-	-	13-03-2024	B,C1,C3/D6	20-03-2024	24-04-2024	30-08-2024	
16	7/G/2024/PTUN.JPR	27-03-2024	-	-	-	27-03-2024	B,C1,C3/D7	03-04-2024	2-05-2024	2-5-2025	
17	8/G/2024/PTUN.JPR	03-04-2024	-	-	-	03-04-2024	B,C1,C3/D5	18-04-2024	8-05-2024	22-08-2024	
18	9/G/2024/PTUN.JPR	17-04-2024	-	-	-	17-04-2024	C3,C1,C2/D3	25-04-2024	22-05-2024	19-09-2024	
19	10/G/2024/PTUN.JPR	02-05-2024	-	-	-	02-05-2024	C1,C2,C3/D7	13-05-2024	25-06-2024	24-09-2024	
20	11/G/2024/PTUN.JPR	14-05-2024	-	-	-	14-05-2024	B,C1,C3/D2	21-05-2024	11-06-2024	15-10-2024	
21	12/G/2024/PTUN.JPR	14-06-2024	-	-	-	14-06-2024	C1,C2,C3/D7	27-06-2024	29-07-2024	19-08-2024	
22	13/G/2024/PTUN.JPR	01-07-2024	-	-	-	01-07-2024	A,C1,C3/D	09-07-2024	23-07-2024	31-10-2024	
23	14/G/2024/PTUN.JPR	16-07-2024	-	-	-	16-07-2024	C3,C1,C2/D6	16-07-2024	24-07-2024	17-12-2024	
24	15/G/2024/PTUN.JPR	23-07-2024	-	-	-	-	-	-	-	28-07-2024	
25	16/G/2024/PTUN.JPR	29-07-2024	-	-	-	29-07-2024	B, C1, C3/D1	14-08-2024	06-09-2024	-	
26	17/G/2024/PTUN.JPR	13-08-2024	A/D	21-08-2024	26-08-2024	-	-	-	-	-	
27	18/G/2024/PTUN.JPR	19-08-2024	-	-	-	19-08-2024	A, C2, C4/D4	27-08-2024	06-09-2024	-	
28	19/G/2024/PTUN.JPR	21-08-2024	-	-	-	21-08-2024	B, C2, C3/D7	28-08-2024	18-09-2024	-	
29	20/G/2024/PTUN.JPR	13-09-2024	-	-	-	13-09-2024	-	17-09-2024	15-10-2024	-	
30	21/G/2024/PTUN.JPR	13-09-2024	-	-	-	-	-	-	-	23-09-2024	
31	22/G/2024/PTUN.JPR	07-10-2024	-	-	-	07-10-2024	B, C2, C3/D6	15-10-2024	31-10-2024	-	
32	23/G/2024/PTUN.JPR	07-10-2024	-	-	-	07-10-2024	B, C2, C3/D3	15-10-2024	29-10-2024	-	

NO	NOMOR PERKARA	TANGGAL PENERIMA AN	DISMISSAL			TANGGAL PENETAPAN MH/HT&PP	SUSUNAN MAJELIS HAKIM & PP	ACARA BIASA/ACARA CEPAT			KETERANGAN			
			TANGGAL		PEMRIKSAN PERSIAPAN			TANGGAL						
			PANGGIL AN	PENETAP AN				DIMULAI SIDANG	PUTUSAN					
1	2	3	4	5	6	12	13	14	15	16	20			
33	24/G/2024/PTUN JPR	30-10-2024	-	-	-	-	-	-	-	-	11-11-2024			
34	25/G/2024/PTUN JPR	01-11-2024	-	-	-	01-11-2024	B, C1, C2/D2	14-11-2024	22-11-2024	-				
35	26/G/2024/PTUN JPR	08-11-2024	-	-	-	08-11-2024	A, C1, C2/D	20-11-2024	28-11-2024	-				
36	27/G/2024/PTUN JPR	14-11-2024	-	-	-	14-11-2024	B, C1, C2/D5	02-12-2024	30-12-2024	-				
37	28/G/2024/PTUN JPR	22-11-2024	-	-	-	22-11-2024	B, C1, C2/D7	02-12-2024	30-12-2024	-				
38	29/G/2024/PTUN JPR	25-11-2024	-	-	-	26-11-2024	B, C1, C2/D7	03-12-2024	17-12-2024	17-12-2024				
39	30/G/2024/PTUN JPR	03-12-2024	-	-	-	03-12-2024	A, B, C2/D1	17-12-2024		-				
40	31/G/2024/PTUN JPR	09-12-2024	-	-	-	09-12-2024	A, B, C1/D4	19-12-2024		-				
41	32/G/2024/PTUN JPR	09-12-2024	-	-	-	09-12-2024	A, B, C1/D6	19-12-2024		-				
42	33/G/2024/PTUN JPR	16-12-2024	-	-	-	16-12-2024	B, C1, C2/D7	-		-				

- Keadaan Perkara Tingkat Banding

**Tabel 8. Keadaan Perkara Tingkat Banding di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura**

No.	Nomor Perkara	Tanggal			Nomor Perkara Banding
		Putusan PTUN Jayapura	Permohonan Banding	Pengiriman Berkas	
1.	23/G/2023/PTUN.JPR	18-01-2024	26-01-2024	27-02-2024	12/B/2024/PT.TUN MDO
2.	24/G/2023/PTUN.JPR	24-01-2024	01-02-2024	04-03-2024	13/B/2024/PT.TUN MDO
3.	27/G/2023/PTUN.JPR	28-03-2024	05-04-2024	05-04-2024	25/B/2024/ PT.TUN MDO
4.	30/G/2023/PTUN.JPR	28-03-2024	05-04-2024	05-04-2024	24/B/2024/ PT.TUN MDO
5.	29/G/2023/PTUN.JPR	27-03-2024	16-04-2024	16-05-2024	26/B/2024/PT.TUN MDO
6.	33/G/2023/PTUN.JPR	21-05-2024	27-05-2024	19-06-2024	29/B/2024/PT.TUN MDO
7.	6/G/2024/PTUN.JPR	30-08-2024	02-09-2024	08-10-2024	44/B/2024/PT.TUN MDO
8.	1/G/2024/PTUN.JPR	05-09-2024	17-09-2024	21-10-2024	46/B/2024/ PT.TUN MDO
9.	9/G/2024/PTUN.JPR	19-09-2024	27-09-2024	28-10-2024	48/B/2024/ PT.TUN MDO
10.	11/G/2024/PTUN.JPR	15-10-2024	23-10-2024	14-11-2024	50/B/2024/ PT.TUN MDO
11.	13/G/2024/PTUN.JPR	31-10-2024	12-11-2024	09-12-2024	53/B/2024/ PT.TUN MDO
12.	22/G/2024/PTUN.JPR	20-11-2024	26-11-2024	16-12-2024	55/B/2024/ PT.TUN MDO

- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

**Tabel 9. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura**

NO	NOMOR PERKARA	TANGGAL					NOMOR PERKARA KASASI
		TERIMA BERKAS PT.TUN	PUTUSAN PT.TUN	PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PT.TUN MDO	PERMOHONAN KASASI	PENGIRIMAN BERKAS	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	20/G/2023/PTUN.JPR	15-12-2023	14-12-2023	15-12-2023	20-12-2023	17-01-2024	179 K/TUN/2024
2	14/G/2023/PTUN.JPR	14-12-2023	14-12-2023	15-12-2023	20-12-2023	22-01-2023	181 K/TUN/2024
3	7/G/2023/PTUN.JPR	08-12-2023	08-12-2023	14-12-2023	28-12-2023	29-01-2024	206 K/TUN/2024
4	6/G/LH/2023/PTUN.JPR	29-02-2024	29-02-2024	01-03-2024	14-03-2024	25-04-2024	458 K/TUN/2024
5	21/G/2023/PTUN.JPR	19-03-2024	18-03-2024	19-03-2024	27-03-2024	02-05-2024	357 K/TUN/2024
6	23/G/2023/PTUN.JPR	21-05-2024	16-05-2024	21-05-2024	29-05-2024	15-06-2024	497 K/TUN/2024
7	24/G/2023/PTUN.JPR	21-05-2024	20-05-2024	21-05-2024	30-05-2024	15-06-2024	513 K/TUN/2024
8	27/G/2023/PTUN.JPR	01-07-2024	25-06-2024	01-07-2024	05-07-2024	14-08-2024	
9	30/G/2023/PTUN.JPR	01-07-2024	25-06-2024	01-07-2024	05-07-2024	14-08-2024	
10	33/G/2023/PTUN.JPR	06-09-2024	04-09-2024	06-09-2024	13-09-2024	29-10-2024	
11	6/G/2024/PTUN.JPR	26-11-2024	20-11-2024	26-11-2024	26-11-2024	29-11-2024	
12	1/G/2024/PTUN.JPR	05-12-2024	11-12-2024	06-12-2024	19-12-2024	-	
13	9/G/2022/PTUN.JPR	11-12-2024	25-06-2024	12-12-2024	19-12-2024	-	

- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

**Tabel 10. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura**

NO	NOMOR PERKARA	TANGGAL					NOMOR PERKARA PENINJAUAN KEMBALI
		TERIMA BERKAS MAHKAMAH AGUNG	PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG	PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG	PERMOHONAN PK	PENGIRIMAN BERKAS	
1	2	14	15			16	19
1	2/G/2022/PTUN.JPR	22-11-2022	14-11-2022	22-11-2022	22-05-2023	23-06-2023	174 PK/TUN/2023
2	7/G/2023/PTUN.JPR	29-07-2024	02-07-2024	30-07-2024	09-09-2024	25-10-2024	193 PK/TUN/2024

**B. Penyelesaian Perkara**

• **Jumlah Sisa Perkara yang Diputus**

Penyelesaian perkara Tahun 2024 adalah meliputi sisa perkara tahun lalu (2023) ditambah dengan perkara yang diterima sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Selama Tahun 2024, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menerima 33 perkara. Adapun sisa perkara tahun 2023 sebanyak 9 perkara. Sehingga jumlah perkara yang ditangani tahun 2024 sebanyak 42 perkara.

**Tabel 11. Jumlah Perkara Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura**

Perkara Sisa Tahun 2023	Perkara Masuk Tahun 2024	Jumlah Perkara Tahun 2024
9 Perkara	33 Perkara	42 Perkara

Status perkara gugatan berjalan per 31 Desember 2024 dirincikan pada tabel berikut :

**Tabel 12. Status Perkara Gugatan per 31 Desember 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura**

NO	NOMOR PERKARA	TANGGAL REGISTER	KLASIFIKASI PERKARA	STATUS PERKARA
1	2	3	4	5
1	23/G/2023/PTUN.JPR	21-05-2023	Pertanahan	Pemberitahuan Putus Kasasi
2	24/G/2023/PTUN.JPR	21-05-2023	Pertanahan	Pemberitahuan Putus Kasasi
3	25/G/2023/PTUN.JPR	25-08-2023	Kepegawaian	Minutasi
4	26/G/2023/PTUN.JPR	11-11-2023	Lain-lain	Minutasi
5	27/G/2023/PTUN.JPR	19-11-2023	Lain-lain	Pemberitahuan Putus Kasasi
6	29/G/2023/PTUN.JPR	24-10-2023	Lain-lain	Pemberitahuan Putus Kasasi
7	30/G/2023/PTUN.JPR	31-10-2023	Pertanahan	Penyerahan Kontra Memori Kasasi
8	31/G/2023/PTUN.JPR	16-11-2023	Pertanahan	Permohonan Eksekusi
9	33/G/2023/PTUN.JPR	30-11-2023	Pertanahan	Penyerahan Kontra Memori Kasasi
10	1/G/2024/PTUN.JPR	16-01-2024	Lain-lain	Penyerahan Kontra Memori Kasasi
11	2/G/2024/PTUN.JPR	26-01-2024	Kepegawaian	Minutasi
12	3/G/2024/PTUN.JPR	31-01-2024	Lain-lain	Minutasi
13	4/G/2024/PTUN.JPR	07-02-2024	Lain-lain	Minutasi
14	5/G/2024/PTUN.JPR	26-02-2024	Kepegawaian	Minutasi
15	6/G/2024/PTUN.JPR	13-03-2024	Lain-lain	Penyerahan Kontra Memori Kasasi
16	7/G/2024/PTUN.JPR	27-03-2024	Kepegawaian	Persidangan
17	8/G/2024/PTUN.JPR	03-04-2024	Kepegawaian	Minutasi
18	9/G/2024/PTUN.JPR	17-04-2024	Lain-lain	Persidangan/Putusan Sela
19	10/G/2024/PTUN.JPR	02-05-2024	Pertanahan	Minutasi
20	11/G/2024/PTUN.JPR	14-05-2024	Kepegawaian	Pemberitahuan Putusan banding
21	12/G/2024/PTUN.JPR	14-06-2024	Pertanahan	Minutasi
22	13/G/2024/PTUN.JPR	01-07-2024	Pertanahan	Pengiriman Berkas Banding
23	14/G/2024/PTUN.JPR	16-07-2024	Pertanahan	Minutasi
24	15/G/2024/PTUN.JPR	23-07-2024	Pertanahan	Minutasi
25	16/G/2024/PTUN.JPR	29-07-2024	Pertanahan	Minutasi
26	17/G/2024/PTUN.JPR	13-08-2024	Pertanahan	Minutasi
27	18/G/2024/PTUN.JPR	19-08-2024	Pertanahan	Minutasi
28	19/G/2024/PTUN.JPR	21-08-2024	Pertanahan	Persidangan/Putusan Sela
29	20/G/2024/PTUN.JPR	13-09-2024	Pertanahan	Persidangan/Putusan Sela
30	21/G/2024/PTUN.JPR	13-09-2024	Lain-lain	Minutasi
31	22/G/2024/PTUN.JPR	07-10-2024	Lain-lain	Pengiriman Berkas Banding
32	23/G/2024/PTUN.JPR	07-10-2024	Pertanahan	Persidangan/Putusan Sela
33	24/G/2024/PTUN.JPR	30-10-2024	Lain-lain	Minutasi
34	25/G/2024/PTUN.JPR	01-11-2024	Kepegawaian	Persidangan
35	26/G/2024/PTUN.JPR	08-11-2024	Pertanahan	Persidangan
36	27/G/2024/PTUN.JPR	14-11-2024	Lain-lain	Persidangan
37	28/G/2024/PTUN.JPR	22-11-2024	Pertanahan	Persidangan
38	29/G/2024/PTUN.JPR	25-11-2024	Lain-lain	Minutasi
39	30/G/2024/PTUN.JPR	03-12-2024	Lain-lain	Pemeriksaan Persiapan

40	31/G/2024/PTUN.JPR	09-12-2024	Perijinan	Pemeriksaan Persiapan
41	32/G/2024/PTUN.JPR	09-12-2024	Perijinan	Pemeriksaan Persiapan
42	33/G/2024/PTUN.JPR	18-12-2024	Lain-lain	Pemeriksaan Persiapan

- **Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu**

**Putusan Pengadilan** adalah kesimpulan yang diputuskan oleh Hakim di Pengadilan tingkat pertama. Tujuan akhir dari proses pemeriksaan perkara di Pengadilan adalah dengan diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan. Ada tiga hambatan yang sering dihadapi lembaga peradilan yakni penanganan perkara yang lambat, kesulitan mengakses informasi pengadilan, dan integritas aparatur peradilan terutama hakim.

Proses penanganan perkara pada Pengadilan tingkat pertama sesuai dengan SOP adalah selama 150 hari kalender semenjak perkara tersebut didaftarkan di pengadilan tingkat pertama. Terdapat 29 perkara yg sudah diputus pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura selama kurun waktu 2024. Dari 29 perkara tersebut, 10 perkara atau 34,5% diselesaikan dengan tepat waktu yaitu dibawah 150 hari kalender, sementara 19 perkara lainnya atau 65,5% melebihi waktu yg ditetapkan yaitu 150 hari kalender. Hal ini mengalami penurunan dibanding pada tahun 2023 dimana persentase penyelesaian perkara tepat waktu sebesar 75%.

**Tabel 13. Ketepatan Waktu Putusan Perkara yang Diproses pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura**

NO	NOMOR PERKARA	TANGGAL REGISTER	TANGGAL PUTUS	KETEPATAN WAKTU
1	2	3	4	6
1	23/G/2023/PTUN.JPR	21-05-2023	18-01-2024	LEWAT WAKTU
2	24/G/2023/PTUN.JPR	21-05-2023	24-01-2024	LEWAT WAKTU
3	25/G/2023/PTUN.JPR	25-08-2023	31-01-2024	LEWAT WAKTU
4	26/G/2023/PTUN.JPR	11-11-2023	12-02-2024	LEWAT WAKTU
5	27/G/2023/PTUN.JPR	19-11-2023	28-03-2024	LEWAT WAKTU
6	29/G/2023/PTUN.JPR	24-10-2023	27-03-2024	LEWAT WAKTU
7	30/G/2023/PTUN.JPR	31-10-2023	28-03-2024	TEPAT WAKTU
8	31/G/2023/PTUN.JPR	16-11-2023	02-04-2024	TEPAT WAKTU
9	33/G/2023/PTUN.JPR	30-11-2023	21-05-2024	LEWAT WAKTU
10	1/G/2024/PTUN.JPR	16-01-2024	05-09-2024	LEWAT WAKTU
11	2/G/2024/PTUN.JPR	26-01-2024	04-06-2024	TEPAT WAKTU
12	3/G/2024/PTUN.JPR	31-01-2024	26-02-2024	TEPAT WAKTU
13	4/G/2024/PTUN.JPR	07-02-2024	29-08-2024	LEWAT WAKTU
14	5/G/2024/PTUN.JPR	26-02-2024	17-04-2024	TEPAT WAKTU
15	6/G/2024/PTUN.JPR	13-03-2024	30-08-2024	LEWAT WAKTU
16	7/G/2024/PTUN.JPR	27-03-2024	02-05-2024	TEPAT WAKTU
17	8/G/2024/PTUN.JPR	03-04-2024	22-08-2024	TEPAT WAKTU
18	9/G/2024/PTUN.JPR	17-04-2024	19-09-2024	LEWAT WAKTU
19	10/G/2024/PTUN.JPR	02-05-2024	24-09-2024	TEPAT WAKTU
20	11/G/2024/PTUN.JPR	14-05-2024	15-10-2024	LEWAT WAKTU

21	12/G/2024/PTUN.JPR	14-06-2024	19-08-2024	TEPAT WAKTU
22	13/G/2024/PTUN.JPR	01-07-2024	31-10-2024	TEPAT WAKTU
23	14/G/2024/PTUN.JPR	16-07-2024	17-12-2024	LEWAT WAKTU
24	15/G/2024/PTUN.JPR	23-07-2024	26-07-2024	TEPAT WAKTU
26	17/G/2024/PTUN.JPR	13-08-2024	26-08-2024	TEPAT WAKTU
30	21/G/2024/PTUN.JPR	13-09-2024	23-09-2024	TEPAT WAKTU
33	24/G/2024/PTUN.JPR	30-10-2024	11-11-2024	TEPAT WAKTU
38	29/G/2024/PTUN.JPR	25-11-2024	17-12-2024	TEPAT WAKTU

• **Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK**

1. Banding

Banding merupakan upaya hukum untuk meminta pengadilan yang lebih tinggi memeriksa ulang putusan dari Pengadilan Tingkat Pertama. Perlunya mengajukan banding jika pemohon tidak puas dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut. Alasan mengajukan banding, di antaranya: Putusan tidak adil, terjadi kesalahan dalam persidangan, Putusan tidak dapat dipertahankan berdasarkan bukti-bukti.

Data perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dilihat dari perkara yang putus pada tahun 2024, rincian sebagai berikut :

**Tabel 14. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura**

NO	NOMOR PERKARA	KETERANGAN
1	2	3
1	25/G/2023/PTUN.JPR	Minutasi
2	26/G/2023/PTUN.JPR	Minutasi
3	2/G/2024/PTUN.JPR	Minutasi
4	3/G/2024/PTUN.JPR	Minutasi
5	4/G/2024/PTUN.JPR	Minutasi
6	5/G/2024/PTUN.JPR	Minutasi
7	8/G/2024/PTUN.JPR	Minutasi
8	10/G/2024/PTUN.JPR	Minutasi
9	12/G/2024/PTUN.JPR	Minutasi
10	14/G/2024/PTUN.JPR	Minutasi
11	15/G/2024/PTUN.JPR	Minutasi
12	16/G/2024/PTUN.JPR	Minutasi
13	17/G/2024/PTUN.JPR	Minutasi
14	18/G/2024/PTUN.JPR	Minutasi
15	21/G/2024/PTUN.JPR	Minutasi
16	24/G/2024/PTUN.JPR	Minutasi
17	29/G/2024/PTUN.JPR	Minutasi

Dari perkara yang diputus di tahun 2024 sebanyak 12 perkara atau 41% melakukan upaya hukum Banding, sisanya 17 perkara atau 59% tidak melakukan upaya hukum Banding. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap putusan pengadilan dimana tahun 2023 persentase yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 50%.

## 2. Kasasi

Kasasi perlu diajukan untuk memperbaiki putusan pengadilan yang salah atau tidak sesuai dengan hukum. Kasasi juga dapat dilakukan untuk memastikan penerapan peraturan hukum yang benar.

Data perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dilihat dari perkara yang putus pada tahun 2024, rincian sebagai berikut :

**Tabel 15. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura**

NO	NOMOR PERKARA	KETERANGAN
1	2	3
1	29/G/2023/PTUN.JPR	Minutasi
2	11/G/2024/PTUN.JPR	Minutasi
3	13/G/2024/PTUN.JPR	Minutasi
4	22/G/2024/PTUN.JPR	Minutasi

Dari 12 perkara yang diputus di tingkat Banding tahun 2024 sebanyak 8 perkara atau 67% melakukan upaya hukum Kasasi, sisanya 4 perkara atau 33% **tidak** melakukan upaya hukum Kasasi. Angka ini menunjukkan penurunan persentase dimana tahun 2023 persentase yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah 50%.

## 3. Peninjauan Kembali

*(Inhoud van gewijde)*

Putusan kasasi merupakan putusan yang *telah* memiliki kekuatan hukum yang tetap<sup>✓</sup> oleh karena itu jika masih tidak puas dengan putusan kasasi, para pihak dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung melalui *Panitera Pengadilan*, *tu pertama* Permohonan peninjauan kembali diajukan tidak hanya atas ketidakpuasan terhadap putusan kasasi, tetapi terhadap *semua* putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam arti terhadap putusan pengadilan yang tidak diajukan banding dapat diajukan peninjauan kembali, terhadap putusan pengadilan tinggi yang tidak diajukan kasasi dapat dimohon peninjauan kembali. Namun, upaya hukum peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali.

**Tabel 16. Jumlah Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura**

NO	NOMOR PERKARA	KETERANGAN
1	2	3
1	7/G/2023/PTUN.JPR	Telah diputus Tanggal 18 Desember 2024 tapi Salinan putusan belum diunggah di SIPP

Terdapat perkara kasasi yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali di tahun 2024 sebanyak 1 perkara.

## C. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

- **Posbakum**

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma – Cuma kepada penerima bantuan hukum, penerima bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang – Undang. Organisasi kemasyarakatan yang memberikan jasa hukum yang dipilih berdasarkan seleksi yang telah ditetapkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan Sejati.

Pemberian pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura melayani :

1. Pemberian informasi, Dokumen, Konsultasi dan Advice hukum yang diperlukan oleh masyarakat.
2. Pemberi bantuan hukum sesuai dengan peraturan perundang- Undangan;
3. Penjamin dan pemenuhan hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan secara profesional.
4. Melayani konsultasi hukum Tata Usaha Negara;
5. Melayani beracara Cuma – Cuma / Prodeo

- **Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu**

Pada tahun 2024, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura melaksanakan sidang keliling untuk 2 perkara tetapi dioptimalkan menjadi 3 perkara. Adapun sidang keliling tersebut dilaksanakan di Timika Provinsi Papua Tengah, Manokwari Provinsi Papua Barat dan Wamena Provinsi Papua Pegunungan.

- **Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)**

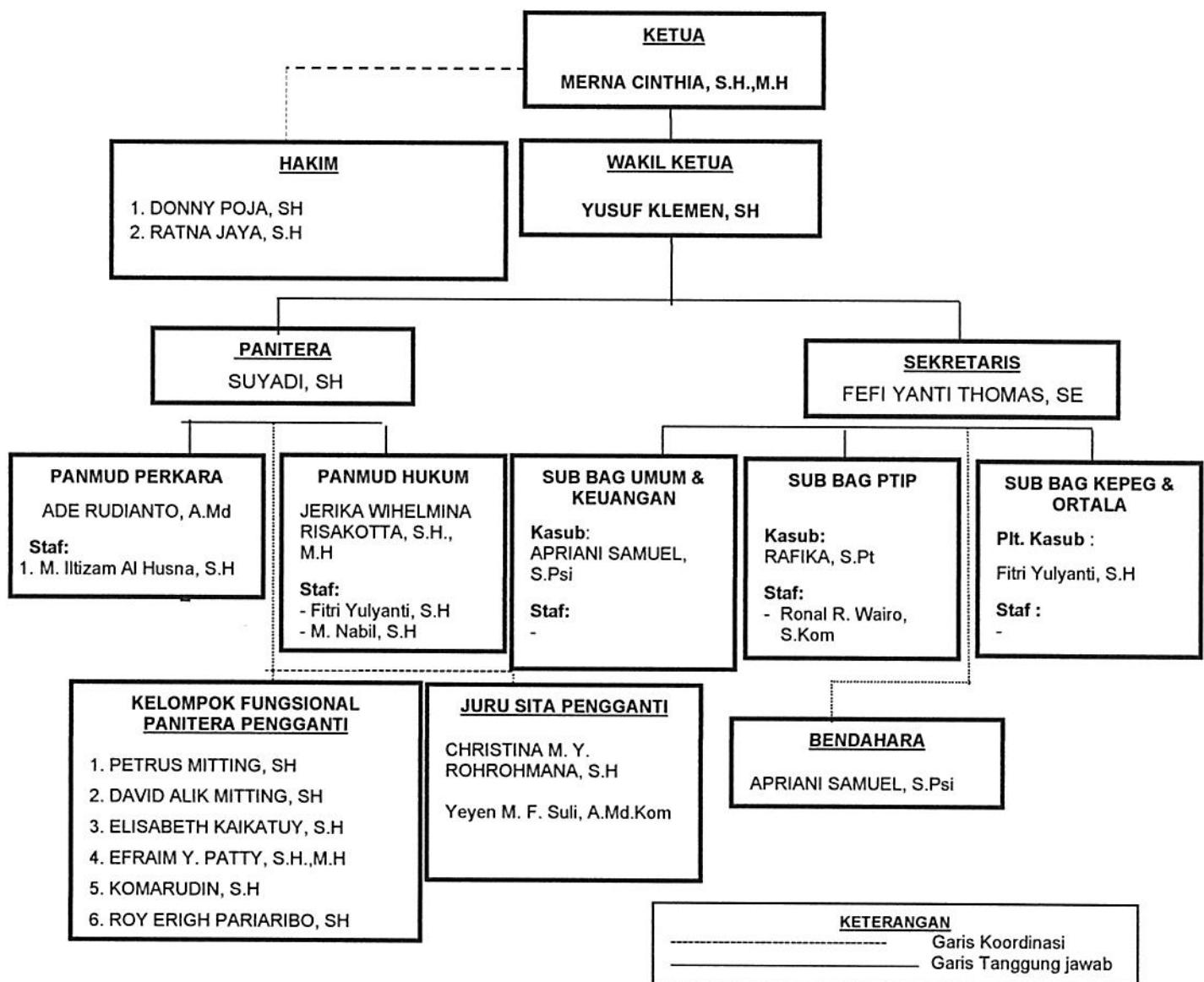
Prodeo adalah pembebasan biaya perkara dipengadilan yang mana biaya tersebut dibiayai Negara melalui Mahkamah Agung. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tetang Pedoman pemberian layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. Besarnya biaya perkara prodeo yang tertuang dalam DIPA 05 Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura unit kerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara adalah Rp. 510.000,- (*lima ratus sepuluh ribu rupiah*) untuk 1 (satu) perkara prodeo.

### BAB III

## SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia merupakan modal utama suatu organisasi yang harus mendapat perhatian utama, karena termasuk bagian dari penentu keberhasilan organisasi. Oleh karena itu melalui program pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kemampuan dan professional aparatur hukum sehingga dapat menjalankan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. Kondisi sumber daya manusia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tahun 2024 sebagai berikut :

### STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA (Sesuai Perma No. 7 Tahun 2015)



## 1. Profil Sumber Daya Manusia

Adapun Susunan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah sebagai berikut:

**Tabel 17. Susunan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura**

No.	Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Merna Cinthia, S.H., M.H NIP. 197810292001122001	Hakim Madya Muda / (IV/b)	Ketua	
2	Yusup Klemen, S.H NIP. 196605121992031002	Hakim Madya Muda / (IV/b)	Wakil Ketua	
3	Ratna Jaya, S.H NIP. 197501312006042001	Hakim Madya Pratama / (IV/a)	Hakim	
4	Donny Poja, S.H NIP. 197706232009041002	Hakim Pratama Muda / (III/d)	Hakim	
5	Suyadi, S.H NIP. 197205151994031002	Pembina / (IV/a)	Panitera	
6	Ade Rudianto, A.Md NIP. 196706041994031012	Penata Tingkat I / (III/d)	Panmud Perkara	
7	Jerika W. Risakotta, S.H., M.H NIP. 197903122001122002	Pembina / (IV/a)	Panmud Hukum	
8	Petrus Mitting, S.H NIP. 196706161992031004	Penata Tingkat I / (III/d)	Panitera Pengganti	
9	David Alik Mitting, S.H NIP. 198007212012121004	Penata Muda Tingkat I / (III/b)	Panitera Pengganti	
10	Elizabeth Kaikatuy, S.H NIP. 197307271997122001	Penata Muda Tingkat I / (III/b)	Panitera Pengganti	
11	Komarudin, S.H NIP. 198305242012121002	Penata Muda Tingkat I / (III/b)	Panitera Pengganti	
12	Efraim Y. Patty, S.H NIP. 198107312006041003	Penata Muda Tingkat I / (III/b)	Panitera Pengganti	
13	Fefi Yanti Thomas, S.E NIP. 197903102006042002	Pembina / (IV/a)	Sekretaris	
14	Christina M. Y. Rohrohmana, S.H NIP. 198508172019032006	Penata Muda Tingkat I / (III/b)	Jurusita Pengganti	Bendahara Penerimaan
15	Apriani Samuel, S.Psi NIP. 198804222019032006	Penata Muda Tingkat I / (III/b)	Kasubag Umum & Keu	Bendahara Pengeluaran
16	Rafika, S.Pt NIP. 198301242011042001	Penata Tingkat I / (III/d)	Kasubag PTIP	
17	Fitri Yulyanti, S.H NIP. 198008092008012028	Penata / (III/c)	Analis Prk Peradilan	Plt. Kasub Kepegawaian dan Ortala
18	Ronald R. Wairo, S.Kom NIP. 199106022020121004	Penata Muda / (III/a)	Pranata Komputer	
19	Yeyen F. Suli, A.Md NIP. 199201062019032006	Pengatur Tingkat I / (II/c)	Juru Sita Pengganti	

20	M. Iltizam Al Husna, S.H NIP. 200104062024051001	Penata Muda / (III/a)	Analis Perkara Peradilan	
21	M. Nabil, S.H NIP. 200010102024051001	Penata Muda / (III/a)	Analis Perkara Peradilan	
22	Indra Febrian, S.H NIP. 198002182008012015	Penata / (III/c)	Analis Tata Laksana	
23	Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H. NIP. 197005291995031002	Pembina (IV/a)	Staf Kepaniteraan Hukum	Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Jayapura
24	Billy Langoy		PPNPN	
25	Syane Ratag		PPNPN	
26	Esti Sitinjak		PPNPN	
27	Heni M. Klemen		PPNPN	
28	Rahmat		PPNPN	
29	Izak Pattipeilohy		PPNPN	
30	Ridwan Kristiawan		PPNPN	
31	Jhon Lewakabessy		PPNPN	
32	Maikel P. Kelyanin		PPNPN	
33	Hose P. Mangallo		PPNPN	

#### A. Mutasi

**Mutasi** adalah pemindahan karyawan dari satu lokasi, departemen atau posisi, ke lokasi, departemen, atau posisi lainnya. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas organisasi serta memberikan kesempatan bagi PNS untuk mengembangkan karir, sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi. Pejabat dan atau pegawai yang pada Tahun 2024 mendapat mutasi dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 18. Mutasi Pegawai pada Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura**

NO.	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.	Lowrensya Siagian, S.H NIP. 199811012022032006	Klerek - Analis Perkara Peradilan PTUN Jayapura	Klerek - Analis Perkara Peradilan PN Bojonegoro Kls IB
2.	Meice Tjandra, S.E., S.H., M.H NIP. 198004032009042005	Jurusita PTUN Jayapura	Panitera Pengganti PTUN Manado
3	Roy Erigh Pariaribo, S.H NIP. 196808181992031004	Panitera Pengganti PTUN Pontianak	Panitera Pengganti PTUN Jayapura
4	Dedy W. Nugraha, S.Tr NIP. 199712082020121001	Pengelola BMN PTUN Jayapura	Penata Layanan Operasional PN Sumenep Kls IB
5	Jusak Sindar, S.H NIP. 197604012001121002	Ketua PTUN Jayapura	Ketua PTUN Gorontalo

## B. Promosi

Promosi jabatan adalah kenaikan jabatan yang diberikan kepada aparatur sipil negara. Promosi jabatan merupakan bentuk penghargaan kepada ASN yang telah menunjukkan kinerja dan dedikasi yang baik. Pejabat dan atau pegawai yang pada Tahun 2024 mendapat promosi adalah sebagai berikut.

**Tabel 19. Promosi Pegawai pada Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura**

No.	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Meice Tjandra, S.E.,S.H.,M.H NIP. 198004032009042005	Juru Sita Pengganti PTUN Jayapura	Panitera Pengganti PTUN Manado
2	Yeyen F. Suli, A.Md NIP. 199201062019032006	Pengolah Data dan Informasi PTUN Jayapura	Juru Sita Pengganti PTUN Jayapura
3	Merna Cinthia, S.H., M.H NIP. 197810292001122001	Wakil Ketua PTUN Jayapura	Ketua PTUN Jayapura
4	Yusup Klemen, S.H NIP. 196605121992031002	Hakim PTUN Jayapura	Wakil Ketua PTUN Jayapura

## C. Pensiun

Pensiun adalah kondisi ketika seseorang berhenti bekerja karena sudah mencapai usia pensiun atau atas permintaan sendiri. Pensiun juga bisa diartikan sebagai jaminan hari tua dan balas jasa atas pengabdian kepada negara atau perusahaan. Di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tahun 2024 tidak ada pegawai yang pensiun atau purnabakti

## D. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis)

Diklat merupakan singkatan dari pendidikan dan pelatihan. Diklat adalah serangkaian proses untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan seorang pegawai demi tercapainya tujuan suatu organisasi.

Pendidikan Pelatihan maupun Bimbingan Teknis yang diikuti oleh Pegawai baik Teknis maupun Non Teknis pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel 20. Diklat SDM Teknis dan Non Teknis Hakim dan Pegawai pada Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura**

No.	Nama	Jabatan	Nama Diklat	Pelaksana
1	Apriani Samuel, S.Psi NIP. 198804222019032006	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pelatihan Online Manajemen Pengelolaan Barang Milik Negara Batch I	Diklat PKN BPK RI Gowa

2	Ade Rudianto, A.Md NIP. 196706041994031012	Panitera Muda Perkara	Upaya Hukum secara Elektronik bagi Panitera Muda Perkara	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
3	Yusup Klemen, S.H NIP. 196605121992031002	Wakil Ketua	Pendalaman Gugatan melalui Citizen Law Suit (CLS) Class Action dan Legal Standing bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
			Pembinaan Teknis secara Hybrid	Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
4	Suyadi, S.H NIP. 197205151994031002	Panitera	Bimtek Kepaniteraan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Wilayah Hukum PTTUN Manado	PTTUN Manado
5	Ronald R. Wairo, S.Kom NIP. 199106022020121004	Pranata Komputer Ahli Pertama	Bimtek Kepaniteraan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Wilayah Hukum PTTUN Manado	PTTUN Manado
6	Donny Poja, S.H NIP. 197706232009041002	Hakim	Pembinaan Teknis secara Hybrid	Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
			Bimbingan Teknis Sengketa Pengesahan Badan Hukum bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara
			Sosialisasi PERMA No. 1/2023 dan Peningkatan Kapasitas Hakim LingkungN	Kepala Badan Strajak Diklat Kumdil MARI
7	Ratna Jaya, S.H., M.H NIP. 197501312006042001	Hakim	Pembinaan Teknis secara Hybrid	Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
8	Fefi Yanti Thomas, S.E NIP. 197903102006042002	Sekretaris	Pembinaan Teknis secara Hybrid	Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
9	Merna Cinthia, S.H., M.H NIP. 197810292001122001	Ketua	Pembinaan Teknis secara Hybrid	Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
10	Christina M. Y. Rohrohmana, S.H NIP. 198508172019032006	Analis Perkara Peradilan	PJJ Bendahara Pengeluaran	Pusdiklat Keuangan
11	Efraim Y. Patty, S.H., M.H NIP. 198107312006041003	Panitera Pengganti	Bimtek Penyusunan BA Persidangan bagi Panitera Pengganti Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2024	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara
12	Yeyen M. F.Suli, A.Md NIP. 199201062019032006	Juru Sita Pengganti	PJJ Bendahara Penerimaan	Pusdiklat Keuangan
13	Komarudin, S.H NIP. 198305242012121002	Panitera Pengganti	Bimtek Penyusunan BA Persidangan bagi Panitera Pengganti Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2024	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara

14	Rafika, S.Pt NIP. 198301242011042001	Kasub PTIP	PJJ Bendahara Pengeluaran	Pusdiklat Keuangan
15	Fitri Yulyanti, S.H NIP. 198008092008012028	Analis Perkara Peradilan	PJJ Bendahara Pengeluaran	Pusdiklat Keuangan

## BAB IV

### PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

#### A. PENGELOLAAN KEUANGAN

##### 1. DIPA Badan Urusan Administrasi 539138

Anggaran yang diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada Tahun 2024 DIPA (539138) berjumlah **Rp. 5.706.454.000,-** (*lima milyar tujuh ratus enam juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah*), dengan rincian untuk Belanja Pegawai sebesar **Rp. 3.797.872.000,-** (*tiga milyar tujuh ratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*). Belanja Barang Operasional sebesar **Rp. 1.901.332.000,-** (*satu milyar Sembilan ratus satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah*). Belanja Barang Non Operasional sebesar **Rp. 7.250.000,-** (*tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).

Realisasi Anggaran di Tahun 2024 untuk DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura (539138) mencapai 98,30% dari total anggaran DIPA Tahun 2024, yaitu senilai **Rp. 5.609.617.641,-** dengan rincian sebagai berikut :

###### a. Belanja Pegawai :

Anggaran Belanja Pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 yang tersedia sebesar **Rp. 3.797.872.000,-** dengan rincian dapat dilihat pada tabel :

**Tabel 21. Rincian Anggaran Belanja Pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura**

AKUN	BELANJA PEGAWAI	PAGU	REALISASI	SISA
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp 1.324.080.000	Rp 1.324.076.940	Rp 3.060
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp 23.000	Rp 16.903	Rp 6.097
511121	Belanja Tunj. Suami/Isteri PNS	Rp 90.564.000	Rp 90.520.440	Rp 43.560
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	Rp 32.004.000	Rp 31.993.302	Rp 10.698
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	Rp 32.760.000	Rp 32.760.000	Rp 0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	Rp 1.440.492.000	Rp 1.380.450.000	Rp 60.042.000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	Rp 254.759.000	Rp 254.733.221	Rp 25.779
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	Rp 67.000.000	Rp 66.264.300	Rp 735.700
511129	Belanja Uang Makan PNS	Rp 187.310.000	Rp 184.434.000	Rp 4.876.000
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	Rp 198.000.000	Rp 197.200.000	Rp 800.000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	Rp 12.480.000	Rp 12.410.000	Rp 70.000
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	Rp 158.400.000	Rp 141.600.000	Rp 16.800.000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 3.797.872.000</b>	<b>Rp 3.714.098.034</b>	<b>Rp. 87.773.966</b>

**b. Belanja Barang :**

Di dalam anggaran Belanja Barang ini terdapat belanja barang operasional dan non operasional. Anggaran Belanja Barang dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 yang tersedia sebesar **Rp. 1.908.582.000,-** dengan rincian akun pada tabel :

**Tabel 22. Rincian Belanja Barang dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura**

No	Akun	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa
1	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Rp 839.429.000	Rp 837.560.057	Rp 17.867.120
2	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat	Rp 9.360.000	Rp 8.731.180	Rp 585.960
3	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	Rp 56.712.000	Rp 54.868.000	Rp 7.056.000
4	521219	Tes Urin Bebas Narkoba	Rp 7.250.000	Rp 7.250.000	Rp 316.000
5	521811	Belanja Barang Persediaan Konsumsi	Rp 73.100.000	Rp 72.686.195	Rp 413.805
6	522112	Belanja Langganan Telepon	Rp 4.320.000	Rp 4.314.445	Rp 5.555
7	522113	Belanja Langganan Air	Rp 624.000	Rp 616.000	Rp 8.000
8	522141	Belanja Sewa (Web hosting)	Rp 5.300.000	Rp 5.239.200	Rp 60.800
9	523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp 506.916.000	Rp 506.768.503	Rp 147.497
10	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	Rp 56.713.000	Rp 56.700.000	Rp 13.000
11	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 222.540.000	Rp 215.739.407	Rp 6.800.593
12	524111	Belanja Perjalanan Biasa	Rp 124.548.000	Rp 123.276.620	Rp 1.271.380
13	524114	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 1.770.000	Rp 1.770.000	Rp 0
<b>TOTAL</b>		<b>Rp 1.908.582.000</b>	<b>Rp 1.895.519.607</b>	<b>Rp 13.062.393</b>	

**c. Belanja Modal**

Tidak terdapat Anggaran Belanja Modal dalam DIPA Tahun Anggaran 2024.

**2. DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara 539139**

Anggaran yang diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada Tahun 2024 DIPA (539139) berjumlah **Rp. 150.680.000,-** (*seratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah*), dengan rincian Belanja Barang sebesar **Rp. 150.680.000,-** (*seratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah*).

**Tabel 23. Rincian Belanja Barang dalam DIPA Ditjenbadilmiltun Tahun Anggaran 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura**

AKUN	BELANJA BARANG	PAGU	REALISASI	SISA
e 521211	Belanja Bahan	Rp 24.850.000	Rp 24.820.000	Rp 30.000
e 522131	Belanja Jasa Konsultan	Rp 28.800.000	Rp 28.800.000	0
a 521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Rp 360.000	Rp 9.000	Rp 351.000
l 522191	Belanja Jasa Lainnya	Rp 300.000	Rp 300.000	0
i 524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 96.370.000	Rp 95.674.240	Rp 695.760
<b>S JUMLAH</b>		<b>Rp 150.680.000</b>	<b>Rp 149.603.240</b>	<b>Rp 1.076.760</b>

asi Anggaran di Tahun 2024 untuk DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura (539139) mencapai 99,28% dari total anggaran DIPA Tahun 2024, yaitu senilai **Rp. 149.603.240,-** (seratus empat puluh Sembilan juta enam ratus tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah).

### 3. LAPORAN KEUANGAN PERKARA 2024

#### a. Biaya Perkara/Panjar Biaya Perkara

Panjar biaya perkara adalah uang muka yang dibayarkan untuk mengajukan gugatan atau permohonan di pengadilan. Panjar biaya perkara digunakan untuk berbagai keperluan, seperti biaya administrasi, surat pemanggilan, dan ongkos juri sita. Jika sisa panjar biaya perkara ada, maka uang tersebut akan dikembalikan kepada penyetor.

**Tabel 24. Laporan Biaya/Panjar Biaya Perkara Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura**

No.	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4+5)
1	Saldo Awal	Rp 59.319.000	-	-	59.319.000
2	Januari	-	46.447.000	72.822.000	32.944.000
3	Februari	-	7.170.000	10.284.000	29.830.000
4	Maret	-	9.355.000	5.226.000	33.959.000
5	April	-	34.485.000	39.631.000	28.813.000
6	Mei	-	5.667.000	6.591.000	27.889.000
7	Juni	-	3.296.500	5.070.500	26.115.000
8	Juli	-	6.656.000	4.009.000	28.762.000
9	Agustus	-	2.783.500	5.240.500	26.305.000
10	September	-	13.115.000	9.017.000	30.403.000
11	Okttober	-	1.090.500	8.640.500	22.853.000
12	November	-	13.057.000	13.410.000	22.500.000
13	Desember	-	6.267.500	2.151.500	26.616.000
Jumlah		Rp 59.139.000	Rp 155.390.000	Rp 185.023.500	Rp 29.505.500

**b. Biaya Proses/ATK/Pemberkasan**

Biaya pemberkasan perkara meliputi biaya penggandaan berkas, biaya pengiriman berkas, biaya alat tulis kantor seperti kertas, tinta, lem, dan lain-lain serta biaya map atau sampul gugatan

**Tabel 25. Laporan Biaya Proses/ATK/Pemberkasan Perkara Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura**

No.	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4+5)
1	Saldo Awal	9.250.500		-	9.250.500
2	Penerimaan	-	5.050.000	-	-
3	Pengeluaran (untuk seluruh pembelian ATK secara riil, tidak perlu dirinci satu persatu)	-	-	5.889.000	-
Jumlah		9.250.500	5.050.000	5.889.000	8.411.500

**c. Biaya Eksekusi**

Biaya eksekusi pengadilan adalah biaya yang harus dibayarkan untuk melaksanakan eksekusi suatu perkara. Biaya ini dapat meliputi biaya pemberitahuan, biaya penyampaian berita acara, dan biaya penetapan perintah eksekusi.

**Tabel 26. Laporan Biaya Eksekusi Perkara Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura**

No.	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4+5)
1	Saldo Awal	1.435.000	-	-	-
2	Penerimaan	-	2.900.000	-	-
3	Materai	-	-	110.000	-
4	Biaya Surat Panggilan	-	-	210.000	-
5	Biaya Surat Pemberitahuan		-	394.000	
6	Hak-hak Kepaniteraan	-	-	296.000	-
7	Surat Pemberitahuan Kepada Presiden/DPR	-	-	541.000	-
8	Pengumuman Media Cetak	-	-	775.000	-
9	Pengembalian Sisa Panjar	-	-	784.000	-
10	Lain-lain	-	-	-	-
Jumlah		Rp 1.420.000	Rp 2.900.000	Rp 3.160.000	Rp 1.175.000

#### d. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

PNBP merupakan pendapatan negara selain dari sektor pajak. PNBP bersumber dari pemanfaatan sumber daya alam, layanan publik, dan layanan tambahan yang diatur oleh pemerintah. PNBP merupakan pendukung utama APBN.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pengadilan adalah pendapatan yang diperoleh negara dari layanan-layanan di pengadilan. PNBP pengadilan merupakan salah satu jenis PNBP perkara. Contoh PNBP pada pengadilan adalah:

- Pendaftaran permohonan banding
- Penyerahan akta banding kepada pembanding
- Penyerahan memori banding
- Penyerahan kontra memori banding
- Surat pemberitahuan inzage kepada pembanding dan terbanding
- Surat pemberitahuan putusan atau penetapan kepada pembanding dan terbanding
- Pencabutan banding
- Surat pemberitahuan pencabutan banding

**Tabel 27. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DIPA BUA dan DIPA DITJENBADILMILTUN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura**

Penerimaan PNBP DIPA 01	Rp. 31.183.781
Disetorkan	Rp. 31.183.781
Penerimaan PNBP DIPA 05	Rp. 16.614.000
Disetorkan	Rp. 16.614.000

### B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

#### 1. Sarana dan Prasarana Gedung

Gedung PTUN Jayapura beralamat di Jln. Raya Sentani – Waena ,Sarana gedung PTUN Jayapura dibangun pada tahun 1992/1993. Dengan luas tanah: 3.500 m<sup>2</sup> dan dengan rincian luasan gedung 2494 m<sup>2</sup>, halaman gedung 2000 m<sup>2</sup> dan pagar 222 m<sup>2</sup>.

#### 2. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas adalah kendaraan yang disediakan oleh perusahaan atau instansi pemerintah untuk keperluan operasional. Kendaraan dinas digunakan untuk menunjang kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kendaraan dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sebagian besar dinyatakan rusak berat, tidak layak pakai, atau tidak ekonomis untuk diperbaiki dan dapat dihapuskan dari daftar inventaris barang milik negara.

Penghapusan kendaraan dinas dilakukan sebelum kendaraan dinas dijual. Kendaraan dinas yang kondisi rusak berat ini dalam proses penghapusan.

**Tabel 28. Laporan Kendaraan Dinas Per 31 Desember 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura**

NO	JENIS KENDARAAN	STATUS	MEREK	THN PEMBELIAN	NO. POLISI	KONDISI
1.	Mini Bus	Dinas	Toyota Kijang	1993	PA 1697 DZ	Rusak Berat
2.	Mini Bus	Sda	KT.40	2003	PA 1689 DZ	Baik
3.	Mini Bus	Sda	Toyota Innova	2011	PA 60	Baik
4.	Mini Bus	Sda	Sedan T.vios	2006	PA 1810 DZ	Baik
5.	Mini Bus	Sda	Kijang Innova	2012	PA 1988 DZ	Baik
6.	Spd Motor	Sda	Honda Nf 125 s	2005	PA 4743 DZ	Rusak Berat
7.	Spd Motor	Sda	Honda NF125 S	2005	PA 4290 DZ	Rusak Berat
8.	Spd Motor	Sda	Honda S 125R	2007	PA 4518 DZ	Rusak Berat
9.	Spd Motor	Sda	Honda Fitx 100	2007	PA 4519 DZ	Baik
10.	Spd Motor	Sda	Honda Fitx 100	2008	PA 4517 DZ	Rusak Berat
11.	Spd Motor	Sda	Honda Fitx 100	2008	PA 4301 DZ	Rusak Berat
12.	Spd Motor	Sda	Honda Fitx 100	2008	PA 4133 DZ	Rusak Berat
13.	Spd Motor	Sda	Honda Fitx 100	2009	DS 6800 AE	TGR
14.	Spd Motor	Sda	Honda Revo	2007	PA 3473 DZ	Baik
15.	Spd Motor	Sda	Honda Revo	2009	PA 4658 DZ	Baik
16.	Spd Motor	Sda	Matic beat	2011	PA 4372 RZ	Rusak Berat
17.	Spd Motor	Sda	Honda Revo	2011	PA 4396 DZ	Baik
18.	Spd Motor	Sda	Honda Revo	2011	PA 4289 DZ	Baik
19.	Spd Motor	Sda	Honda Revo	2011	PA 4132 DZ	Rusak Berat

**Foto kendaraan dinas PTUN Jayapura**



5 Kendaraan dinas roda empat



### 3. Rumah Dinas

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura memiliki enam rumah dinas, dua rumah dinas masing-masing ketua dan wakil ketua dan empat rumah dinas untuk hakim. Berikut adalah gambar rumah dinas pada PTUN Jayapura :



Rumah Dinas Ketua



Rumah Dinas Wakil Ketua

Rumah Dinas Hakim





**Gedung Kantor Tampak Depan**



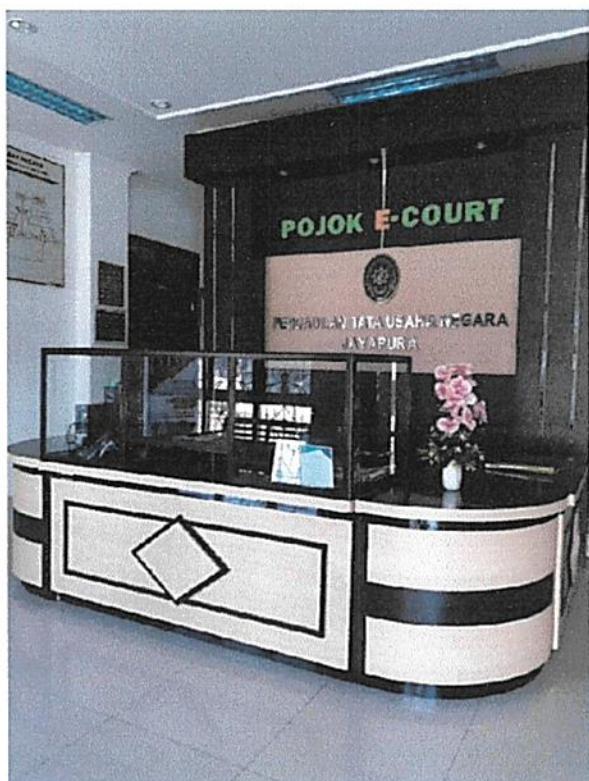
**Kantor Tampak Samping Kiri**



**Kantor Tampak Samping Kanan**



**Kantor Tampak Belakang**



**Tampak Ruangan Lobi Depan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura**



Ruangan Perpustakaan dan Fotocopy



Ruangan Sidang



Ruangan Arsip

#### 4. Daftar Barang Milik Negara (BMN)

Tabel 29. Daftar Sarana dan Prasarana Barang Milik Negara Per 31 Desember 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	NAMA BARANG MILIK NEGARA	STATUS		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	2	-	-
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	-	-
3	Genset	1	-	-
4	Sedan	1	-	-
5	Mini Bus	3	-	1
6	Sepeda Motor	8	-	9
7	Kursi Roda	1	-	-
8	Cermin Besar	2	-	3
9	Rak-rak Kayu	14	1	1
10	Lemari Besi	3	-	7

11	Lemari Kayu	30	6	8
12	Brankas	2	-	-
13	CCTV	1	-	-
14	Papan Visual/Papan Nama	6	-	11
15	Papan Pengumuman	-	1	-
16	White Board	1	-	1
17	LCD Projektor/Infocus	1	-	-
18	Alat Kantor Lainnya	1	-	3
19	Meja Kerja Kayu	57	14	50
20	Kursi Besi	29	4	44
21	Kursi Kayu	20	31	41
22	Sice	5	3	12
23	Bangku Panjang Kayu	20	7	7
24	Meja komputer	-	1	3
25	Meja resepsionis	-	1	-
26	Sketsel	2	-	-
27	Kursi Fiber Glass	23	33	14
28	Sofa	1	-	-
29	AC Split	21	-	15
30	Mixer	2	-	1
31	Televisi	3	-	6
32	Amplifire	2	1	-
33	Loudspeaker	6	-	8
34	Compact disk player	-	1	-
35	Tiang Bendera	4	1	1
36	Kaca Hias	1	-	1
37	Palu Sidang	2	-	1
38	Lambang Instansi	1	-	-
39	Handy Cam	1	-	-
40	Audio Mixing Console	1	-	-
41	Microphone/Wireless Mic	6	-	2
42	UPS	7	-	-
43	Microphone cable	11	-	-
44	Camera Conference	1	-	-
45	Kursi Dorong	1	-	-
46	Walker Polding	2	-	-

47	Komputer jaringan lainnya	3	-	-
48	PC	25	4	13
49	Laptop	8	-	-
50	Notebook	9	6	5
51	Printer	6	6	16
52	scanner	2	-	2
53	server	1	-	1
54	router	1	-	1
55	Rak server	1	-	-
56	Alat Tenis Meja	-	1	-
57	Bangunan Gedung kantor permanen	1	-	-
58	Rumah negara golongan I tipe B permanen	2	-	-
59	Rumah negara golongan I tipe C permanen	4	-	-
60	Pagar permanen	1	-	-
61	Referensi	18	-	-

### C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Sistem informasi sebagai sesuatu yang menjalankan fungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan tertentu. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk mengolah data secara ekonomis menjadi informasi atau pengetahuan.

Komposisi dari sistem informasi terdiri dari : perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, jaringan kerja, dan manusia.

Program aplikasi adalah program komputer yang dirancang untuk mendukung tugas tertentu, saat ini PTUN Jayapura terdapat aplikasi SIPP yang digunakan untuk menginput perkara dari satuan kerja ke pusat, dalam hal ini bertujuan untuk tertibnya administrasi perkara. Demikian juga di bidang keuangan, kepegawaian, umum, yang didukung dengan sistem aplikasi yang mempermudah proses pekerjaan dan pelaporan. Untuk memperluas informasi pada kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam kegiatan kerjanya, saat ini tersedia situs yang dapat diakses untuk mengetahui setiap informasi kantor ke masyarakat luas yang berisi tentang berbagai informasi dalam berbagai hal seperti informasi perkara, keuangan, kepegawaian, umum dan lain-lain yang di dukung dengan peralatan computer dan jaringan internet untuk mengakses data. Hal tersebut juga disertai dengan sumber daya manusia yang mampu dan dapat mengelolanya dengan baik untuk mencapai tujuan dan prosedur untuk kelancaran informasi. Jaringan internet menggunakan vendor pihak ketiga yaitu Telkom Indonesia dan Starlink dengan kecepatan 500 Mbps dengan

pengaturan 1 acces point 300 Mbps termasuk untuk kepentingan pelaksanaan SIPP, 100 Mbps untuk ruang sidang online dan 100 Mbps untuk ruang media center.

Berikut rincian pengelolaan teknologi informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

➤ **Implementasi E-court di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Jayapura**

e-Court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban) dan pemanggilan secara online. Aplikasi e-court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

Penerapan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik atau yang disebut dengan e-court telah memberikan dampak langsung bagi praktik advokat di Indonesia. Kemudahan yang diberikan dalam sistem teknologi canggih sistem pelayanan e-court menjadi sebuah kebutuhan dalam proses menyelesaikan perkara di pengadilan dengan mobilitas tinggi para pihak dan para penasihat hukum (advokat). Advokat diharuskan untuk memiliki akun resmi dengan mendaftar dalam sistem e-court sehingga keberadaannya diakui secara formil. Namun, para advokat yang tidak memiliki akun e-court akan menjadi terhalang ketika membela klien di sejumlah pengadilan, hal ini sesuai dengan pasal 6 ayat 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang berbunyi : Mahkamah Agung berhak untuk menolak pendaftaran pengguna terdaftar yang tidak dapat diverifikasi. Selain itu, sistem e-court juga dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.122/KMA/SK/VII/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan.

Penggunaan layanan e-court dalam administrasi perkara pada dasarnya atas kesediaan kedua belah pihak yang berperkara. Artinya, tidak diwajibkan secara penuh menggunakan sistem online namun bisa dilakukan secara manual. Apabila salah satu pihak yang berperkara menolak menggunakan layanan e-court, maka perkara akan disidangkan dengan prosedur biasa. Perma menghendaki persetujuan para pihak untuk menggunakan sistem e-court atau tidak. Penerapan e-court sendiri sudah diberlakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan disambut baik oleh para advokat dengan mendaftarkan perkaranya dengan menggunakan e-court.

➤ **Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Jayapura**

SIPP merupakan sebuah aplikasi manajemen perkara yang menyediakan data dan informasi untuk masyarakat seperti status perkara, jadwal sidang dan informasi lainnya yang dapat diakses melalui situs web maupun pada meja informasi di pengadilan. Bagi

aparatur pengadilan, SIPP juga bermanfaat terkait pemasukan dan pengolahan data serta pencetakan laporan dan untuk memonitor dan inventarisasi perkara yang ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Sejauh ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura selama tahun 2024 menerima 33 perkara gugatan dan semuanya telah diinput pada SIPP PTUN Jayapura.

Selain peningkatan kinerja, penerapan SIPP juga dapat berdampak positif pada tingkat pelayanan terhadap masyarakat yang akan berujung pada meningkatnya kepercayaan kepada lembaga peradilan.

Pada saat ini SIPP sedang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan administrasi perkara sesuai dengan Pola Bindalmin. Diharapkan akhir tahun ini, kita sudah memiliki aplikasi yang dapat mendukung pelaksanaan administrasi untuk semua jenis perkara, termasuk jurnal keuangan, dokumen template, dan pelaporan perkara secara elektronik.

- Pengelolaan website sudah sepenuhnya dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura termasuk akun Hosting sudah atas nama Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Tanggung jawab pengelolaan ada pada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sesuai SK Nomor 134/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/I/2024 tentang Tim Pengelola Website Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Web admin diserahkan kepada Rafika, S.Pt selaku Kasubbag PTIP dan Ronald R. Wairo, S.Kom selaku Pranata Komputer Ahli Pertama.
- Media Sosial juga sudah dikelola oleh Tim Media Sosial untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Di dalamnya melibatkan PPNPN sebagai Tim Pengumpul Informasi dan Editor. Setiap postingan yang terposting pada media social diberikan insentif sesuai kesepakatan untuk memacu kreatifitas bersama. Media Sosial tersebut adalah Facebook, Instagram, Tiktok dan Youtube.

## BAB V

### PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

#### **A. Akreditasi Penjaminan Mutu**

Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) adalah pengakuan resmi yang diberikan kepada suatu lembaga atas kemampuannya dalam menjalankan kegiatannya. APM dilakukan untuk memastikan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi standar yang ditetapkan.

Pada Pengadilan, Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) adalah kegiatan yang dilakukan pengadilan untuk meningkatkan efisiensi, profesionalisme, dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan pengadilan. APM merupakan pengembangan dari sertifikasi ISO. Kegiatan ini dilakukan oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu masing-masing Badan Peradilan. Tujuan APM adalah untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik.

Berikut adalah beberapa contoh kegiatan APM:

- Penandatanganan pakta integritas komitmen bersama
- Penandatanganan perjanjian kinerja
- Penandatanganan perjanjian kerja PPNPN
- Pemeriksaan awal terhadap para pimpinan
- Pemeriksaan terhadap kepaniteraan dan kesekretariatan
- Pemeriksaan terhadap petugas PTSP dan petugas pojok e-Court

Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah A Excellent.

#### **B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sebagai lembaga Peradilan di bawah Mahkamah Agung, sejak sekitar akhir tahun 2018 telah menjalankan PTSP dengan memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Ruang lingkup PTSP di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ini meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi lingkup kompetensi/kewenangannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Penerapan PTSP sendiri memiliki tujuan untuk:

- 1) Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,
- 2) Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme.

Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga Pengadilan terhadap seluruh masyarakat yang mencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Secara umum Prosedur PTSP dilaksanakan melalui tahapan berikut:

- 1) Pemohon mengambil nomor antrian yang telah disediakan,
- 2) Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan untuk setiap layanan peradilan yang dimohonkan dan merupakan dasar untuk pemrosesan serta penyelesaian permohonan layanan,
- 3) Petugas PTSP mencatat, memverifikasi dan meneruskan kelengkapan berkas/dokumen ke backoffice untuk diproses sesuai SOP yang telah ditentukan.

### **C. Inovasi Pelayanan Publik**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah menyediakan survey PTSP melalui aplikasi yang disematkan pada Vestouch Interactive Android Kiosk yang diletakkan pada lobi depan kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Dimana penggunanya tdk perlu menulis hanya menyentuh layar pada android besar itu.

Inovasi Pelayanan Peradilan ini untuk meningkatkan kepercayaan dan kemudahan kepada publik, serta memotivasi pegawai pengadilan untuk terus-menerus meningkatkan pelayanan publik dan mendiseminasi sebuah inovasi pelayanan publik ke pengadilan lain . Hal ini efektif mendorong kreatifitas, profesionalisme dan respon inovasi pelayanan publik pengadilan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sendiri pun mengembangkan e-PAPEDAKU (Pelayanan Pengadilan dan Bantuan Hukum Elektronik) di mana di dalamnya terdapat aplikasi SAGUKU MANIS (Sistem Aplikasi Gugatan dan Surat Kuasa Mandiri Instan), Layanan Prodeo, e-bankum (bantuan hukum elektronik) dan konsel (konsultasi elektronik) yang dapat diakses di website resmi Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Adapun tujuan dari aplikasi ini adalah memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan pengadilan.

## BAB VI

# PENGAWASAN

### A. INTERNAL

Pelaksanaan pengawasan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berpedoman pada keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor :KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dilingkungan Lembaga Peradilan dan Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jayapura sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pengawasan yang dilakukan dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hakekatnya merupakan pelaksanaan pengawasan internal yaitu pengawasan bidang kepaniteraan dan kesekretariatan.

Tujuan dilaksanakannya pengawasan adalah untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan tindakan yang dianggap perlu, menyangkut pelaksanaan tugas-tugas aparat, administrasi umum dan administrasi perkara. Sedangkan fungsi pelaksanaan pengawasan meliputi :

- a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
- c. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya berperkara yang murah.

Dalam melaksanakan pengawasan, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menggunakan dua sistem pengawasan sebagai berikut:

#### 1. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat adalah pengawasan yang bersifat pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 2. Pengawasan Fungsional

Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh pengawas yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja (Satker) tertentu, pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pengawasan internal dilakukan oleh Hakim Pembina dan Pengawas Bidang sebagaimana Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 143/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/I/2024 tanggal 30 Januari 2024, tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan

dan Kesekretariatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, untuk melakukan pengawasan yang meliputi bidang -bidang sebagai berikut :

1. Kepaniteraan Perkara (Register Perkara dan Administrasi Keuangan Perkara)
2. Kepaniteraan Hukum
3. Sub Bagian Umum dan Keuangan
4. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
5. Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi dan Tata Laksana

**Tabel 30. Daftar Nama Hakim Pengawas Bidang Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN	PENGAWAS BIDANG
1	MERNA CINTHIA, S.H., M.H NIP. 197810292001122002	Pembina TK. I (IV/b)	Wakil Ketua	Koordinator Pengawas Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan
2	YUSUF KLEMEN, S.H NIP. 196605121992031002	Pembina TK. I (IV/b)	Hakim	Kepegawaian ORTALA
3	DONNY POJA, S.H NIP. 197706242009041002	Penata TK.I (III/d)	Hakim	Bagian Umum dan Keuangan
				Perencanaan TI dan Pelaporan
4	RATNA JAYA, S.H NIP. 197501312006042001	Pembina (IV/a)	Hakim	Kepaniteraan Hukum
				Kepaniteraan Perkara

## B. EVALUASI

### 1. Administrasi Perkara

Administrasi perkara meliputi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparat pengadilan yang diberi tugas untuk mengelola penanganan perkara yang meliputi prosedur penerimaan perkara, keuangan perkara, pemberkasan perkara, penyelesaian perkara, dan pembuatan laporan perkara sesuai dengan pola yang sudah ditetapkan.

Pengelolaan administrasi peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura diarahkan kepada pengelolaan administrasi dua urusan :

#### 1. Urusan Perkara administrasinya dilakukan oleh Panitera Muda Perkara:

- Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan perkara.
- Memberi nomor registrasi pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Perkara.

- Mencatat pada setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya.
- Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.
- Mengelola Aplikasi SIPP dan Direktori Putusan.

2. Urusan Hukum administrasinya dilakukan oleh Panitera Muda Hukum:

- Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan melakukan administrasi lain yang diatur dalam perundang-undangan.
- Mengelola meja informasi dan meja pengaduan.

## 2. Administrasi Umum

### a. Bidang Umum

1. Tertibnya Administrasi Persuratan

- Telah mencatat dan mengagendakan semua surat masuk dan surat keluar tahun 2024, yaitu surat masuk sebanyak 604 surat dan surat keluar sebanyak 1365 surat, serta mengarsipkan surat tersebut. Mengarahkan surat masuk sesuai disposisi, dan mengirim surat keluar sesuai dengan tujuan surat.
- Menata arsip serta menyimpannya dalam Ordner/Box File dan lemari arsip.

2. Tertibnya Pengelolaan Barang-barang Inventaris :

- Telah mengelola barang inventaris sesuai dengan Keputusan Sekretaris MARI Nomor : MA/SEK/173a/XI/2005 tentang Penata Usahaan Barang Milik Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan.
- Telah melaksanakan Penetapan status penggunaan BMN pada satker PTUN Jayapura.
- Mengelola SIMAK BMN.
- Membuat laporan Barang Milik Negara semesteran, tahunan dan laporan Kondisi Barang SIMAK. Serta telah melaksanakan rekon BMN ke KPNL.
- Telah membuat DIR, DIL dan KIB Tanah, Bangunan rumah negara dan kendaraan dinas.
- Telah memperpanjang STNK kendaraan roda dua dan roda empat.
- Melakukan pemeliharaan gedung kantor, rumah negara, kendaraan dinas, perangkat IT dan meubelair.

3. Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Perlengkapan kantor.

- Melaksanakan belanja ATK dan perlengkapan kantor.
- Mencatat penerimaan dan pengeluaran ATK dan perlengkapan lainnya.

- Mendistribusikan barang ATK dan perlengkapan kantor lainnya sesuai dengan kebutuhan dan permintaan.
- 4. Pengelolaan Perpustakaan.
  - Menerima, mencatat dan memberi nomor buku-buku yang diterima dengan memberi catalog sesuai dengan klasifikasinya.
  - Mencatat peminjaman dan pengembalian buku-buku perpustakaan.
  - Menyediakan ruang khusus untuk perpustakaan.
- 5. Pengurusan Rumah Tangga Kantor.
  - Menjaga keamanan kantor.
  - Mengangkat tenaga honorer untuk kebersihan dan keamanan kantor.
  - Melengkapi sarana kebersihan dan keamanan kantor.
  - Membuat spanduk dan memasang umbul-umbul jika diperlukan.
- 6. Mengkoordinir Protokoler.
  - Mengkoordinir kegiatan seperti pelantikan, perpisahan, rapat, penyambutan tamu, HUT Kemerdekaan, HUT Peraturan dan lain-lain.
  - Membuat dokumentasi pada setiap kegiatan.
  - Mengadakan/mengikuti rapat dan pertemuan.

**b. Bidang Administrasi Keuangan**

Penataan Administrasi keuangan berada dalam file ditata dalam lemari oleh Kasubbag Keuangan beserta staf adapun pengurusan administrasi di bidang keuangan meliputi ; melaksanakan program belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal .

- Telah dicairkan gaji pegawai dan pembayaran kepada pegawai setiap bulan serta pencairan dan pembayaran rapel bila ada kepada pegawai yang bersangkutan.
- Telah dicairkan dan dibayarkan tunjangan kinerja (remunerasi) dan uang makan kepada pegawai.
- Telah dicairkan dan dibayarkan honorarium kepada pegawai yang bersangkutan.
- Telah dicairkan dan dibayarkan kepada pegawai yang lembur.
- Telah dicairkan dan dibayarkan belanja barang.

**c. Bidang Administrasi Kepegawaian**

Penanganan administrasi di bidang kepegawaian sebagai berikut :

- Kepangkatan meliputi DUK, karpeg/karis/karsu/taspen/askes, KGB, kenaikan pangkat telah dikelola dengan baik.
- Sarana administrasi seperti buku induk, file, buku kendali, statistik kepegawaian telah ditertibkan.
- Jabatan struktural dan fungsional yang ada telah dilakukan pelantikan.
- Penilaian Prestasi Kerja PNS/SKP telah diberikan kepada pejabat penilai/atasan langsung.

- Jam kerja yang diterapkan sudah sesuai dengan ketentuan dan telah dilakukan pengontrolan lewat absen baik secara online melalui aplikasi SIKEP maupun manual (fingerprint)
- Data pegawai telah dibuat dan memuat semua tentang nama hakim, panitera pengganti, dan pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh staf.
- Data pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada SIKEP Mahkamah Agung RI secara berkala diperbarui.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN.**

1. Visi misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menyesuaikan dengan visi misi Mahkamah Agung. Penataan dan pengelolaan manajemen lembaga peradilan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dipercaya, responsif dan produktif, yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, dalam rangka mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara yang agung.
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura merupakan pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
3. Realisasi anggaran telah berjalan dengan baik, hal ini ditandai dengan persentase realisasi anggaran mencapai 98,30% untuk DIPA 01 (539138) dan 99,28% untuk DIPA 05 (539139).
4. Sebagai penunjang kinerja pegawai pengadilan sarana dan prasarana secara keseluruhan masih belum memadai (optimal), perlu adanya penambahan pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah dibuat untuk program kerja tahun 2024.
5. Dalam pelaksanaan kegiatan kerja di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura secara intern melakukan pengawasan baik oleh pimpinan dan pejabat struktural juga oleh Hakim-Hakim pengawas bidang.
6. Hasil pengawasan internal secara berkala dilaporkan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.
7. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah melaksanakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.144/KMA/SKIVIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 sebagai mana telah diubah dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Pengadilan.
8. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah melakukan pelaporan yang berkaitan dengan kegiatan kesekretariatan dan kepaniteraan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, Dirjen MILTUN dan Mahkamah Agung melalui email dan dikirim langsung.

## B. REKOMENDASI

1. Pembinaan Teknis Yudisial, Administrasi Peradilan dan Administrasi Umum perlu terus ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang handal.
2. Mengingat masih kurangnya Tenaga Staf Administrasi dan Pejabat Fungsional dan Struktural pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura maka alokasi Pegawai Tahun Anggaran 2024 untuk Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura agar dapat ditambah melalui mekanisme perekrutan CPNS maupun PPPK Mahkamah Agung RI, sehingga pelayanan kepada pencari keadilan dapat terlaksana dengan semakin baik, kualitas pelatihan-pelatihan perlu ditingkatkan, salah satunya dengan memberikan materi yang praktis atau pemecahan masalah yang dihadapi.
3. Perlu ditingkatkan sarana dan prasarana fasilitas gedung kantor maupun sarana dan prasarana kantor lainnya untuk mendukung kinerja aparat dalam melayani masyarakat pencari keadilan
4. Peningkatan jumlah Anggaran sangat diperlukan agar dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana demi kelancaran pelaksanaan tugas.